

# Implikasi Perdagangan Bebas APEC pada Perekonomian Indonesia

Oleh : Nur Feriyanto



*Drs. Nur Feriyanto, lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Februari 1960. Setelah menyelesaikan S-1 nya di FE UII tahun 1984, dia mengabdikan dirinya di Almamaternya sampai sekarang. Jabatan struktural yang pernah disandangnya antara lain sebagai staf PD III FE UII, Kepala UPT Perpustakaan FE UII dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Jurusan IESP FE UII. Selain itu, dia juga aktif dalam berbagai seminar dan penelitian.*

## Pendahuluan

Pertemuan 18 pimpinan negara Asia Pasific dalam APEC telah berakhir pada tanggal 15 Nopember 1994 dengan melahirkan Deklarasi Bogor (Declaration on Common Resolve). Deklarasi tersebut telah merumuskan arah dan rancangan masa depan kerjasama ekonomi yang akan memperbaiki prospek pertumbuhan ekonomi yang dipercepat, seimbang dan merata di kawasan Asia Pasific. Kerjasama ekonomi tersebut meliputi liberalisasi perdagangan dan investasi serta pembangunan ekonomi.

Indonesia yang sedang tumbuh cepat dalam pembangunan ekonominya makin lama makin menunjukkan perannya dalam kawasan Asia Pasific. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 7% per tahun, jumlah penduduk

191,6 juta pada tahun 1993 dan dengan tingkat kestabilan dan keamanan yang mantap, sehingga tahun 1994 Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah APEC. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia masih mempunyai kinerja ekonomi yang belum efisien dalam aktivitas ekonominya.

Tulisan ini akan memberikan gambaran tentang kemampuan Indonesia dalam mengantisipasi Perdagangan Bebas APEC.

## Perkembangan Penyusunan Deklarasi Bogor

Sebelum diadakannya AELM (APEC Economic Leaders Meeting) yang melahirkan Deklarasi Bogor, pertemuan telah diawali oleh EPG (Eminent Persons Group) atau kelompok tokoh terkemuka

APEC dan PBF (Pacific Business Forum), terdiri dari para pemimpin dunia usaha-dunia usaha negara APEC. Dua kelompok ini membahas tentang pelaksanaan liberalisasi perdagangan dan investasi di Asia Pasific.

Hasil yang diperoleh EPG dalam laporannya yang berjudul: "Achieving the APEC Vision: Free and open Trade in the Asia Pacific"; merekomendasikan dimulainya proses liberalisasi perdagangan pada tahun 2000 dan berakhir tahun 2020. EPG menetapkan dimulainya liberalisasi perdagangan dan investasi yang berbeda untuk kondisi negara yang berbeda. Untuk negara maju seperti Amerika dan Jepang perdagangan bebas dan investasi dimulai pada tahun 2005. Bagi negara-negara industri baru seperti Korea Selatan, Hongkong, Taiwan dan Singapura penerapan liberalisasi perdagangan dan investasi dimulai pada tahun 2015, tetapi untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia perdagangan bebas secara penuh dan investasi diusulkan mulai tahun 2020. Sedangkan oleh PBF dalam laporannya berjudul: "A Business Blueprint for APEC" mengusulkan dimulainya perdagangan penuh dan investasi mulai tahun 1994, dan selesai tahun 2010 untuk negara-negara maju serta tahun 2020 untuk negara-negara berkembang.

Dari kedua laporan tersebut kemudian menjadi bahan bagi pertemuan KTM (Konferensi Tingkat Menteri) VI APEC yang kemudian menyerahkan kepada AELM dalam pertemuannya di Bogor. Hal akhir yang ditelurkan oleh AELM dengan nama Deklarasi Bogor adalah dibukanya perdagangan bebas dan investasi selambat-lambatnya tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara sedang

berkembang di Asia Pasific dengan mengacu pada semangat GATT (WTO). Disamping itu untuk mendukung deklarasi tersebut para pimpinan ekonomi memandang perlu untuk meningkatkan kerjasama di bidang peningkatan infrastruktur ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sumber daya ekonomi, lingkungan pengembangan usaha kecil dan menengah serta mengaktifkan keikutsertaan pihak swasta.

Harapan yang optimis akan keberhasilan kerjasama tersebut akan muncul dengan melihat indikator ekonomi dari 18 negara anggota APEC (tabel 1). Kawasan Asia Pasific mempunyai populasi yang cukup tinggi, tiga dari lima negara yang berpenduduk terbesar dunia terletak di kawasan ini. Penduduk RRC dengan jumlah populasi sebesar 1.196,5 juta, Amerika Serikat dengan penduduk 260,6 juta dan Indonesia dengan populasi 191,6 juta, menjadikan kawasan ini merupakan pasar yang cukup besar untuk menyerap produk dan jasa yang dihasilkan dari negara-negara anggota APEC tersebut. Disamping itu kapasitas sumber daya manusia yang cukup besar itu adalah faktor produksi yang potensial untuk mendukung gerak maju aktivitas ekonomi kawasan ini yang hampir menguasai 60% PDB dunia.

Perkembangan dinamis dari GNP negara-negara anggota APEC dengan rata-rata pertumbuhan 6-7 % pertahun menjanjikan kawasan Asia Pasific adalah kawasan potensial bagi pertumbuhan dunia usaha. Dari kondisi negaranya pun kawasan ini juga merupakan kawasan dengan komposisi negara yang cukup lengkap. Untuk golongan negara dengan tingkat pertumbuhan maju adalah Amerika Serikat,

Jepang dan Kanada dengan GNP per kapita di atas 20.000 US\$. Sedangkan negara-negara industri baru diantaranya adalah negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Singapura. Terdapat pula kelompok negara sedang berkembang dengan prospek yang baik yaitu Indonesia, RRC, Malaysia, Thailand dan Filipina. Dengan kondisi tersebut perkembangan ekonomi kawasan ini sangat potensial, karena antar negara tersebut akan saling mengisi dan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan. Tentunya nilai-nilai indikator tersebut dapat berubah menjadi lebih baik bilamana perdagangan bebas

antar pimpinan negara tersebut tentunya akan mempunyai implikasi yang harus diantisipasi oleh Indonesia baik oleh pihak Pemerintah ataupun swasta khususnya dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap mengacu pada perjanjian GATT yang telah diratifikasi di Marrakesh (Maroko) yang nantinya mulai 1 Januari 1995 akan berubah menjadi WTO (World Trade Organization).

#### Perdagangan Indonesia dalam APEC

Meskipun waktu pelaksanaan perdagangan bebas dan investasi masih 26 tahun lagi (tahun 2020), tetapi Pemerintah

Tabel 1 Indikator Ekonomi 18 Negara Anggota APEC Tahun 1993

NAMA NEGARA	POPULASI (JUTA)	GDP (US\$miliar)	GNP/kapita* (US\$)	GNP Growth (%)	UTANG LN* (US\$miliar)	EKSPOR (US\$miliar)	IMPOR (US\$miliar)
AMERIKA SERIKAT	260,6	5.905,0	23.240,0	4,1	-	457,00	589,00
AUSTRALIA	18,0	304,0	17.260,0	4,3	-	42,00	42,00
BRUNAI DARUSSALAM	0,3	3,6	19.000,0	3,0	-	3,00	3,00
CILI	13,6*	tt	2.730,0	tt	19.360	9,65*	9,46*
CINA	1.196,5	2.855,0	470,0	11,6	69.321	90,00	103,00
FILIPINA	65,9	159,0	770,0	4,1	32.498	11,0	17,00
HONGKONG	6,1	117,0	15.360,0	5,5	-	135,00	139,00
INDONESIA	191,6	558,0	670,0	6,7	84.385	37,00*	28,00*
JEPANG	125,3	2.510,0	28.190,0	0,2	-	351,00	43,00
KANADA	28,4	542,0	20.710,0	3,4	-	144,00	134,00
KOREA SELATAN	44,5	391,0	6.790,0	8,1	42.999	82,00	84,00
MALAYSIA	19,4	151,0	2.790,0	8,1	19.837	48,00	45,00
MEKSIKO	86,6	634,0	3.470,0	3,8	113.360	47,00	50,00
PAPUA NUGINI	4,2	8,2	950,0	14,4	3.376	1,08*	1,54*
SELANDIA BARU	3,5	50,0	12.300,0	6,1	-	10,00*	8,00*
SINGAPURA	3,1	52,0	15.730,0	9,3	-	74,00*	85,00*
TAIWAN	21,0	240,0	10.210,0	6,1	tt	85,00	77,00
THAILAND	59,6	340,0	1.840,0	7,4	39.424	37,00*	45,00

Keterangan:

\* Tahun 1992

tt Tidak tersedia

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

dan investasi yang sesuai Deklarasi Bogor telah berjalan nanti.

Dengan adanya komitmen yang kuat

dan dunia usaha Indonesia harus mulai berbenah untuk dapat mengantisipasi akibat perjanjian APEC tersebut. Adapun

perkembangan perdagangan Indonesia di negara-negara APEC dapat disimak dari tabel 2 di bawah ini:

netto positif (surplus) tetapi bila kita ambil hasil pengamatan Karseno AR (Kelola No. 7/III/1994) terlihat daya saing produk In-

Tabel 2 Neraca Perdagangan RI dengan negara-negara APEC tahun 1992 dan 1993 (dalam ribuan dollar AS)

NEGARA	Tahun 1992		Tahun 1993	
	Eksport	Import	Eksport	Import
Jepang	10.760.524	6.013.748	10.292.278	5.511.215
AS	4.419.105	3.822.440	4.752.159	2.934.822
Singapura	3.313.543	1.670.687	3.068.592	1.645.289
Korsel	2.083.284	1.894.104	2.017.174	1.922.082
RRC	1.396.437	751.517	1.159.150	822.271
Hongkong	881.102	228.963	820.399	226.031
Thailand	352.799	344.658	423.314	217.927
Filipina	181.307	52.158	263.532	50.868
Meksiko	87.323	56.099	128.262	57.348
Papua Nugini	32.193	3.361	21.697	1.528
Brunei	25.315	706	31.080	967
Malaysia	487.535	524.574	534.693	452.401
Taiwan	1.279.305	1.329.325	1.311.609	1.202.826
Australia	746.125	1.412.962	723.859	1.237.341
Kanada	289.032	459.331	276.667	370.001
Selandia Baru	37.416	135.919	55.137	148.537
Chili	20.900	112.799	29.719	120.125

Sumber : Departemen Perdagangan-1994

Dari tabel di atas Perdagangan Indonesia ke negara-negara APEC yang cukup baik adalah ke Jepang, Amerika Serikat dan Singapura, karena dari tahun 1992 ke tahun 1993 mengalami kenaikan yang berarti dan masih surplus perdagangan. Tetapi untuk perdagangan ke negara Australia, Kanada, Selandia Baru dan Chili selama dua tahun tersebut neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit. Meskipun perdagangan ke Jepang, Amerika Serikat dan Singapura menunjukkan nilai

donesia dari ketiga negara sasaran ekspor tersebut, hanya Amerika Serikat dan Singapura yang mempunyai daya saing positif (kuat), sedangkan untuk negara Jepang mempunyai daya saing yang lemah (negatif). Begitu pula untuk negara Hongkong dan Korea Selatan, daya saing yang dimiliki produk ekspor Indonesia adalah negatif (lemah).

Bilamana pengamatan dilakukan pada komposisi komoditi ekspor Indonesia sebagaimana tercantum pada tabel 3, terlihat

masih lemahnya jenis komoditi ekspor Indonesia. Hanya ada 5 (lima) jenis komoditi ekspor Indonesia yang dapat mencapai nilai di atas satu milyar dollar AS, yaitu kayu/gabus, pakaian, tekstil, sepatu dan ikan/kerang-kerangan. Tentunya dengan kondisi di atas masih banyak yang perlu dibenahi dari kinerja ekspor Indone-

Dengan melakukan perbaikan dalam semua sektor, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 1995 diramalkan dapat mencapai 7%. Ramalan ini diperkirakan dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasific yang lebih baik, sehingga ekspor negara Indonesia akan dapat menjadi lebih

Tabel 3 Lima Besar Komoditi Ekspor Indonesia

Mata Dagangan	Nilai Ekspor	Pangsa Pasar
	(dalam miliar USD)	(%)
Kayu / gabus	5,129	18,49
Pakaian	3,02	12,93
Tekstil	2,64	9,74
Sepatu	1,66	3,56
Ikan / kerang-kerang	1,42	2,23

Sumber : Departemen Perdagangan (1993)

sia dalam menyongsong liberalisasi perdagangan pada tahun 2020 nanti.

Adapun permasalahan yang harus segera memperoleh perhatian adalah pembenahan industri Indonesia haruslah mulai berorientasi ekspor dengan peningkatan kualitas yang tinggi dan berdaya saing, baik untuk segi promosi, pelaksanaan ekspor dan regulasi perdagangan yang mendukung. Sehingga diperoleh produk ekspor yang berdaya saing tinggi dan kinerja ekonomi yang sehat dan efisien. Disamping itu jumlah komoditi ekspor Indonesia yang bersaing sangat tinggi harus mulai diperbanyak, karena dengan diversifikasi yang lebih banyak maka alternatif sumber devisa akan lebih bervariasi dan akan memperkecil resiko kehilangan devisa dan memburuknya kondisi neraca perdagangan bilamana terjadi kegoncangan yang mendadak.

baik pula. Kondisi ini akan dapat tercapai bilamana semua pihak baik Pemerintah ataupun pihak swasta baik besar, menengah ataupun kecil dapat bekerjasama dan berbenah diri dalam menyongsong liberalisasi perdagangan tersebut dengan sekuat tenaga.

Kebijaksanaan regulasi oleh Pemerintah secara konsisten dengan mengurangi segala bentuk kolusi dan kebijaksanaan dan struktur "rent seeking economy" yang mendorong ekonomi berbiaya tinggi akan sangat mempengaruhi keberhasilan usaha tersebut. Karena pihak swasta akan dapat berjalan dengan kapasitas riil, efisien dan kempetitif.

Tetapi usaha tersebut di atas akan terpengaruh oleh tersedianya infrastruktur, misalnya transportasi, telekomunikasi, listrik ataupun tersedianya jalan. Sedangkan penyediaan infrastruktur tersebut sangat

ditentukan oleh tersedianya modal untuk investasi.

### Perkembangan Investasi Asing

Kebutuhan investasi di Indonesia untuk mendukung perkembangan perdagangan sangat dirasakan oleh semua pihak. Oleh karenanya Pemerintah selalu mengevaluasi regulasi tentang penanaman modal asing agar peraturan yang berlaku dapat selalu sesuai dengan kondisi yang ada. Begitu pula untuk Paket Kebijakan 23 Oktober 1993 kemudian dievaluasi dan diperbaiki menjadi PP 20 tahun 1994, yang telah membuka peluang yang lebih terbuka bagi PMA untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Untuk mengamati perkembangan PMA di Indonesia dari tahun 1989 sampai tahun 1993 dapat dilihat pada tabel 4.

3.983,4 juta dollar AS kemudian mengalami peningkatan pada tahun 1992 dengan jumlah total PMA 7.279,6 juta dollar AS. Tetapi tahun 1993 mengalami penurunan menjadi 4.608,7 juta dollar AS. Melalui PP 20 tahun 1994 diharapkan kesempatan yang lebih terbuka dan longgar bagi PMA dapat dimanfaatkan secara optimal oleh investor asing, sehingga nilai PMA untuk tahun mendatang akan dapat meningkat lagi.

Dari segi lokasi penempatan investasi di Indonesia juga masih perlu dilakukan pembenahan. Karena dari data BKPM tahun 1993 hampir 60 persen lokasi yang tergarap oleh PMA berada di Kawasan Indonesia bagian Barat. Tentunya kondisi ini tidaklah dapat dibiarkan, karena untuk dapat menumbuhkan perekonomian yang merata maka lokasi pembangunan infrastruktur juga harus merata. Sehingga usaha-usaha

Tabel 4 Investasi Asing di Indonesia  
(dalam juta dollar AS)

Negara	1989	1990	1991	1992	1993
Jepang	778,6	2.240,8	929,3	2.510,6	815,0
Korsel	466,1	722,9	301,3	618,3	660,4
Hongkong	401,5	993,3	227,7	1.020,9	470,6
Taiwan	156,9	618,3	1.057,5	563,3	124,6
Singapura	156,2	265,2	364,4	465,1	1.333,2
AS	348,1	153,7	275,6	922,5	445,3
Belanda	282,8	576,2	183,6	96,2	311,0
Inggris	43,5	59,0	535,7	978,2	310,1
Australia	41,7	186,5	48,4	67,8	118,2
Jerman	6,7	13,5	59,9	36,7	20,3

Sumber : BKPM, April 1994

Melihat perkembangan jumlah investasi oleh PMA di atas cukup menggembirakan karena secara total walaupun terjadi fluktuasi, jumlah PMA masih menunjukkan nilai yang cukup besar. Pada tahun 1991 jumlahnya mencapai

di Kawasan Indonesia bagian Timur yang berpotensi, akan dapat tumbuh menjadi usaha yang potensial dan berdaya saing tinggi serta dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana usaha-usaha di Kawasan Indonesia bagian Barat.

## Kesimpulan

Prospek perdagangan Indonesia ke negara-negara APEC sangat baik, namun di sisi lain masih banyak hal yang harus dibenahi dalam produk Indonesia agar dapat mempunyai daya saing yang kuat. Ada beberapa penyebab yang patut diperhatikan dalam rangka meningkatkan daya saing tersebut yaitu rendahnya kualitas produk jadi Indonesia dalam persaingannya dengan produk pesaing yang disebabkan masih rendahnya kontrol kualitas oleh manufaktur. Inefisiensi dalam kinerja ekonomi masih dijumpai karena masih terjadinya monopoli ataupun oligopoli dalam usaha, sehingga kemampuan kompetisi dalam liberalisasi perdagangan masih lemah.

Antisipasi pasar yang tepat melalui usaha memperoleh informasi pasar yang akurat dan cepat perlu memperoleh perhatian dunia usaha Indonesia. Karena persaingan yang semakin ketat memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Meskipun produk yang disiapkan adalah untuk bersaing dengan produk pesaing itu berarti pasar yang diarah adalah pasar ekspor dan dalam negeri. Pasarekspor diharapkan dapat meningkatkan penyediaan devisa sedangkan pasar dalam negeri harus tetap dijaga dari serbuan produk-produk impor yang tidak boleh ada hambatan lagi masuk ke negeri ini.

Penyediaan infrastruktur juga harus diperhatikan, karena hanya dengan penyediaan infrastruktur yang baik dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Pertumbuhan dan peluang ekonomi akan dapat meningkatkan investasi, tetapi harus tetap diperhatikan dayaampungnya, sehingga kondisi tersebut tidak mengakibatkan adanya "overheated" dalam perekonomian Indonesia. Investasi yang berkembang cepat juga harus tetap dijaga dari sisi impor, sehingga defisit transaksi berjalan yang merupakan titik rawan dalam neraca perdagangan Indonesia tidak menjadi parah, tetapi dengan perbaikan kinerja ekonomi nasional itulah justru diharapkan terjadi perbaikan pada neraca perdagangan Indonesia.

Pemerintah harus terus melakukan deregulasi yang dapat mendukung perbaikan kinerja ekonomi nasional. Sehingga ekonomi biaya tinggi yang masih menghinggapi perekonomian kita dapat dihilangkan yaitu dengan mengikis praktek kolusi, proteksi, monopoli dan kapitalisme semu yang sesungguhnya membebani masyarakat, karena membuat kegiatan ekonomi menjadi tidak efisien serta produk yang dihasilkan menjadi kurang berdaya saing, baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri.

### Referensi

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), *Indonesian Perspectives on APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific*, Jakarta, 1994.

El-Agraa, Ali (ed), *International Economic Integration*, The Mac Milan Press Ltd, London, 1988.

Karseno AR, "Perdagangan Indonesia dengan Negara-negara ASEAN dan 'APEC",

*Kelola* nomor 7/III/1994, Gadjah Mada University Business Review, Yogyakarta, 1994.

*Surat Kabar dan Majalah:*

1. *Harian Bisnis Indonesia*, berbagai edisi
2. *Harian Kompas*, berbagai edisi
3. *Harian Kedaulatan Rakyat*, berbagai edisi
4. *Majalah Warta Ekonomi*, berbagai edisi